

DINAMIKA KARAWITAN KARATON SURAKARTA MASA PEMERINTAHAN PAKU BUWANA X DAN PAKU BUWANA XI: Suatu Komparasi Historis

Joko Daryanto

Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Masa pemerintahan Paku Buwana II merupakan awal perjalanan panjang kehidupan Karawitan Karaton Surakarta. Salah satu fase penting dalam perjalanan tersebut adalah masa pemerintahan Paku Buwana X dan Paku Buwana XI. Ketika Paku Buwana X berkuasa karawitan karaton berkibar bahkan dijadikan kiblat sebagai pusat sumber garap karawitan yang rumit dan halus, memiliki ciri khusus dalam penyajiannya serta memiliki daya tarik yang luar biasa dalam hal penciptaan, garap, maupun penyajian. Puncak kejayaan dan keemasan pada masa pemerintahan Paku Buwana X ditandai dengan adanya perhatian khusus terhadap berbagai garap gending, pola permainan instrumen, serta pengembangan *wilet*. Pasca mangkatnya Paku Buwana X, Paku Buwana XI seakan tidak berdaya mempertahankan kejayaan karawitan selama memerintah di Karaton Surakarta. Hal ini dikarenakan situasi sosial politik dan perekonomian internal Karaton mengalami kemunduran, di samping faktor-faktor dari luar karaton. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mengurangi daerah bawahan (manca negara), pengurangan otonomi, pembatasan ruang gerak raja, serta adanya kontrak politik yang baru sebelum Paku Buwana XI naik tahta diduga merupakan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kehidupan karawitan karaton mengalami kemerosotan.

Kata kunci: Karawitan Karaton Surakarta, Paku Buwana X, Paku Buwana XI

Abstract

The reign of Paku Buwana II marked the beginning of the long journey of Karawitan Karaton Surakarta. One important phase in this journey was the era of Paku Buwana X and Paku Buwana XI. During the reign of Paku Buwana X, karawitan inside the karaton (palace) thrived and even became the focal point or center of karawitan, being recognized for its complex and refined style, its unique performance style, and its extraordinary allure in terms of its inventiveness, garap, and presentation. The height of its golden era during the time of Paku Buwana X was marked by the special attention given to various kinds of garap gending, instrumental playing patterns, and the development of wilet. After Paku Buwana X's death, Paku Buwana XI was seemingly powerless to maintain the former glory of karawitan Karaton Surakarta throughout his reign. This was due to the declining social, political, and economic situation inside the karaton, as well as other external factors. The policies of the Dutch colonial government reduced the area over which the karaton had power, lowered its level of autonomy, restricted the king's movement, and enforced a new political contract before Paku Buwana XI took to the throne, all of which were external factors that caused the life of karawitan in the karaton to deteriorate.

Keywords: Karawitan Karaton Surakarta, Paku Buwana X, Paku Buwana XI

Pengantar

Karaton Surakarta adalah salah satu penerus Kerajaan Mataram yang pecah akibat perjanjian Giyanti (1755) di mana dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Mataram dipecah menjadi dua yaitu Surakarta dan Yogyakarta, perjanjian

tersebut ditandatangani pada 13 Februari 1755.¹ Karawitan sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan tradisi karaton sudah ada sejak pemerintahan Paku Buwana I ketika pusat pemerintahan masih berkedudukan di Kartasura. Sejak saat itu karawitan menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas dan kehidupan

kerajaan. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya karawitan dalam setiap upacara tradisi karaton. Kehadiran karawitan dalam upacara tradisi karaton baik upacara kenegaraan maupun upacara keluarga menunjukkan bahwa karawitan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas karaton. Hal ini dikarenakan seni (karawitan) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas kenegaraan, merupakan tradisi turun-temurun sejak Mataram belum pecah. Dapat dikatakan bahwa karawitan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas kenegaraan, merupakan tradisi turun-temurun sejak Mataram belum pecah. Meski berbagai persoalan serius menimpa Mataram termasuk peristiwa *palihan nagari*² yang mengakibatkan Mataram pecah menjadi dua bagian Surakarta dan Yogyakarta dan kemudian ditambah Pura Mangkunegaran, tradisi seni tetap menjadi bagian dari aktivitas kerajaan.³

Karawitan Karaton Surakarta tercatat sudah menghasilkan karya karawitan sejak masa pemerintahan Paku Buwana II. Petunjuk tentang adanya kegiatan karawitan pada masa itu dapat kita lihat pada tulisan Pradjapangrawit yang melaporkan pada masa itu sudah tercipta 17 gendhing⁴ baik gendhing untuk keperluan klenengan⁵ maupun karawitan tari⁶. Hingga tidak berlebihan jika Karaton Surakarta dianggap sebagai kiblat dalam hal penyajian karawitan. Hal ini dikarenakan karawitan karaton menyajikan karawitan dengan konsep estetika dan etika tradisi karaton yang berlaku sejak ratusan tahun silam. Oleh karena itu wajar apabila keberadaannya mapan, mentradisi, dan bahkan bersifat klasik.⁷

Sejak pemerintahan Paku Buwana II sampai Paku Buwana X karawitan karaton telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Beberapa fase penting perjalanan karawitan karaton sebelum pemerintahan Paku Buwana X adalah masa pemerintahan Paku Buwana IV dan Paku Buwana IX. Masa pemerintahan Paku Buwana IV ditandai dengan banyaknya penciptaan gending dengan komposisi yang panjang serta pembuatan berbagai perangkat gamelan baik gamelan *ageng*⁸ maupun gamelan *pakurmatan*⁹ sedang masa pemerintahan Paku Buwana IX ditandai dengan terciptanya gending-gending *srimpen*¹⁰.

Perjalanan panjang karawitan Karaton Surakarta sejak masa Paku Buwana II menjadikan karawitan karaton menjadi mapan, mentradisi, dan bahkan bersifat klasik sebagaimana pernyataan Rustopo setidaknya berlangsung hingga masa pemerintahan Paku Buwana X. Bahkan pada masa ini karawitan karaton mengalami kejayaan yang luar biasa. Suasana masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang pada masa pemerintahan Paku Buwana X ditunjang dengan kebijakan yang tepat memungkinkan tradisi karaton hidup secara baik.

Ketika Paku Buwana X berkuasa karawitan karaton berkibar bahkan dijadikan kiblat sebagai pusat sumber garap karawitan yang rumit dan halus, memiliki ciri khusus dalam penyajiannya serta memiliki daya tarik yang luar biasa. Salah satu hal yang menyebabkan kesenian-kesenian di karaton memiliki daya tarik yang luar biasa adalah garapan yang rumit, halus, penuh dengan *waton*¹¹, mengalir tanpa gejolak atas dasar konsep estetika dan etika karaton, serta dipupuk dan dijaga kelestariannya oleh penguasa karaton.¹²

Akan tetapi pasca mangkatnya Paku Buwana X kehidupan karawitan karaton seakan tenggelam ditelan bumi. Paku Buwana XI seakan tidak berdaya mempertahankan kejayaan karawitan selama memerintah di Karaton Surakarta sejak menggantikan Paku Buwana X pada tahun 1939 hingga wafat pada tahun 1945. Situasi yang bertolak belakang inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini yaitu mengapa Paku Buwana XI tidak mampu mempertahankan masa keemasan karawitan karaton? Serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan karawitan Karaton Surakarta mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Paku Buwana XI?

Karawitan Masa Paku Buwana X

Paku Buwana X memerintah antara tahun 1893-1939, dalam kurun waktu ini Paku Buwana X memberikan sumbangan yang besar dalam perkembangan karawitan selain pembaharuan bangunan fisik baik di lingkungan karaton maupun di luar tembok karaton. Pada masa pemerintahan Paku Buwana X kebijakan politik pemerintah Belanda tidak lagi memihak ke

karaton. Kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan politik dibatasi oleh pemerintah Belanda, selain membatasi kegiatan politik Paku Buwana X, Belanda juga membatasi kegiatan perekonomian karaton sehingga Paku Buwana X kehilangan legitimasi dalam politik dan perekonomian. Dengan kata lain Paku Buwana X tidak lagi berkuasa penuh, dia hanyalah administrator (*houfhoude*) Belanda untuk Surakarta.¹³

Dapat dibayangkan jika seorang raja dibatasi kegiatan baik politik maupun perekonomiannya maka legitimasi kekuasaannya sudah habis. Lebih dari itu dengan adanya tekanan dari Belanda yang mengakibatkan kekuasaan politik raja berkurang serta kemunduran dalam bidang ekonomi, maka satu-satunya kekuatan yang masih dimiliki raja hanyalah kebudayaan. Melalui simbol-simbol kebudayaan raja masih dapat memainkan peranan bahkan simbol-simbol kebudayaan itu secara implisit digunakan sebagai salah satu senjata melawan pemerintah Belanda. Dengan demikian meskipun secara politik dan ekonomi kekuasaan raja berkurang bahkan sama sekali tidak memiliki kekuasaan, bukan berarti kekuasaan raja berakhir. Paku Buwana X masih memiliki simbol-simbol budaya yang dapat memperkuat kedudukannya sebagai penguasa.¹⁴

Simbol-simbol kebudayaan seperti *pesanggrahan*¹⁵, benda-benda pusaka, bangunan-bangunan, berbagai seni pertunjukan, serta atribut-atribut kebesaran raja, mendapat perhatian khusus. Salah satu contoh perhatian tersebut adalah dalam hal bangunan dengan memasang *Radya Laksana*¹⁶ bertuliskan PB X pada setiap bangunan yang dibangun atau direnovasi atas perintah Paku Buwana X. Simbol-simbol budaya menjadi satu-satunya pilihan dalam rangka menjaga kewibawaan dan mempertahankan kekuasaan raja karena tidak ada pilihan lain hingga Paku Buwana X sangat mementingkan simbol-simbol budaya.¹⁷

Pilihan Paku Buwana X dengan memberdayakan berbagai simbol-simbol budaya yang dimiliki karaton membawa dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan karawitan selain sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kepandaian Paku Buwana X memberdayakan

simbol-simbol budaya baik untuk keperluan mempertahankan kedudukannya sebagai raja maupun sebagai simbol perlawanan menurut Kuntowijoyo dikarenakan Paku Buwana X memiliki *wisdom* serta kecerdasan emosi yang tinggi.¹⁸ Kecerdasan emosi adalah kemampuan mengenal emosi sendiri sehingga orang dapat mengendalikan emosinya, mengenal emosi orang lain sehingga seseorang mempunyai ketrampilan bergaul, dan dapat membina hubungan dengan orang lain.¹⁹

Dengan kepandaiannya memainkan simbol-simbol budaya image bahwa Paku Buwana X masih memiliki kedudukan dan kewibawaan yang kuat dapat dilihat dari sebutan masyarakat kepada Paku Buwana X. Pada masa pemerintahan Paku Buwana X baik *abdi dalem* maupun rakyat kebanyakan menyebut Paku Buwana X dengan sebutan *Sampeyan Dalem Inggang Minulya Saha Wicaksana Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana Inggang Kaping Sadasa*.²⁰ Dalam sebutan tersebut terdapat kata *minulya* yang berarti yang mulia serta *wicaksana* yang berarti bijaksana hingga dapat dipastikan bahwa semua orang masih mengakui kedudukan dan wibawa Paku Buwana X. Pada akhirnya kepandaian Paku Buwana X dalam mengelola simbol-simbol karaton di tengah-tengah himpitan politik pemerintah Belanda mampu memancarkan keagungan, kewibawaan, dan kekuasaannya, serta mempertahankan tradisi kejawaannya.²¹

Simbol budaya yang mendapat perhatian serius dari Paku Buwana X adalah karawitan hingga karawitan mencapai masa keemasan pada masa pemerintahannya. Kebijakan Paku Buwana X memberdayakan simbol-simbol budaya menyebabkan kehidupan karawitan pada masa itu mengalami pencerahan dalam berbagai hal baik sisi penciptaan, garap, maupun penyajian. Dengan kata lain kehidupan karawitan mencapai puncak kejayaan dan keemasan pada masa pemerintahan Paku Buwana X. Puncak kejayaan dan keemasan kehidupan karawitan pada masa pemerintahan Paku Buwana X ditandai dengan adanya perhatian khusus terhadap berbagai garap gending, pola permainan instrumen, serta pengembangan wilet mendapat perhatian yang serius.²²

Kemajuan karawitan yang luar biasa pada masa pemerintahan Paku Buwana X juga ditunjang dengan adanya berbagai kebijakan yang memihak pada kehidupan budaya khususnya karawitan sehingga karawitan mencapai masa keemasannya. Dengan kata lain kemajuan kehidupan karawitan tidak lepas dari usaha Paku Buwana X dengan segala kebijakannya meskipun pada saat itu kebijakan politik pemerintah Belanda tidak memihak ke karaton.

Pradjapangrawit menggambarkan kemajuan kehidupan karawitan pada masa itu dengan ungkapan sebagai berikut:

*Tetabuhan gangsa alus, thuthukanipun nengsemaken, gendhingipun kathah warni-warni; gendhing kina, gendhing baku karaton, gendhing prenes, gendhing gecul, utawi geculan dalah gendhing manca utawi pasisir inggih kacakup.*²³

(Gamelan ditabuh dengan halus, suara yang dihasilkan menghanyutkan, banyak *gendhing*²⁴ yang dikuasai, baik *gendhing kuno*, *gendhing tradisi karaton*, *gendhing prenes*²⁵ *gendhing gecul*²⁶, maupun *gendhing* dari daerah pesisir.)

Gambaran kehidupan karawitan seperti tersebut di atas tentunya juga ditunjang dengan sumber daya manusia dalam hal ini *pengrawit*²⁷ yang berkualitas. Banyak *pengrawit* dengan virtuositas mengagumkan pada masa itu. Diperkirakan jumlah *pengrawit* pada saat itu sekitar 200-an yang terbagi dalam dua kelompok utama, kiri dan kanan, dan terbagi lagi menjadi *abdi dalem niyaga*²⁸ *kasepuhan* (empat kelompok), dan *kadipaten* (dua kelompok) yang masing-masing dibagi menjadi dua golongan, kelompok *kiwa* (kiri) dan kelompok *tengen* (kanan) serta satu kelompok *abdi dalem niyaga panakawan*.²⁹

Besarnya jumlah *pengrawit* dikarenakan Paku Buwana X mengubah kebijakan dalam penerimaan *abdi dalem*³⁰ yaitu dengan mengurangi masa *suwita* dan *magang*. *Suwita* berarti mengabdikan kepada kerabat yang telah menjadi priyayi tingkat tinggi, lama waktu *suwita* ditentukan oleh ketekunan, kerajinan, kejujuran, serta kemampuan mengabdikan, sedangkan *magang* adalah bekerja ke salah satu bagian pemerintah karaton dengan rekomendasi dari priyayi tempat

mengabdikan yang disertai dengan surat keterangan silsilah keluarga.³¹ Dari kedua proses tersebut dapat dilihat bahwa untuk menjadi seorang *abdi dalem* harus melewati proses yang rumit, berliku serta bersifat subyektif karena bergantung pada penilaian seseorang di mana seorang calon *abdi dalem* melaksanakan dua proses tersebut.

Proses *suwita* dan *magang* pada masa Paku Buwana X bukan lagi menjadi menjadi hal pokok yang harus dilewati jika seseorang ingin menjadi *abdi dalem*. Hal ini juga berlaku untuk calon *abdi dalem pengrawit*.³² Pada masa ini proses menjadi *abdi dalem pengrawit* lebih dipermudah, seorang anak *abdi dalem* dapat diangkat secara langsung menjadi *abdi dalem* atas dasar kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh kerajaan. Bahkan kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan kerajaan yang mengatur tentang masalah itu pada tahun 1932.³³

Imbas dari kebijakan itu adalah semakin meningkatnya jumlah *abdi dalem pengrawit* Karaton Surakarta. Peningkatan jumlah *abdi dalem pengrawit* pada masa ini bersamaan dengan peningkatan aktifitas karawitan di Karaton Surakarta. Hal ini agaknya sudah direncanakan dengan matang oleh Paku Buwana X, seiring dengan meningkatnya jumlah *abdi dalem pengrawit*, Paku Buwana X selalu menggelar berbagai upacara tradisi karaton baik upacara kenegaraan maupun kenegaraan secara besar-besaran di mana dalam upacara-upacara itu karawitan selalu hadir. Dalam upacara-upacara itu berbagai perangkat gamelan baik gamelan ageng maupun pakurmatan digelar sehingga memerlukan *pengrawit* dalam jumlah yang besar. Kebijakan Paku Buwana X memberikan kemudahan dalam pengangkatan *abdi dalem* sangat tepat jika dikaitkan dengan posisi raja yang dikurangi kekuasaannya terutama yang berkaitan dengan kegiatan politik dan perekonomian. Dengan memberi kemudahan kepada semua lapisan masyarakat menjadi *abdi dalem* maka di mata rakyatnya Paku Buwana X masih memiliki kekuatan dan kewibawaan.

Keberadaan karawitan karaton yang bisa bertahan begitu lama bahkan mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Paku Buwana X tidak lepas dari fungsi karawitan di karaton yang menduduki peran sentral dalam setiap upacara tradisi karaton selain mendukung

bentuk-bentuk kesenian lain seperti tari dan wayang. Peran karawitan yang demikian besar menyebabkan karawitan karaton menjadi bagian dari kehidupan tradisi karaton. Kehadiran karawitan dalam upacara-upacara tradisi karaton juga terkait dengan fungsi karawitan itu sendiri. Rahayu Supanggah membagi fungsi karawitan dalam dua bagian yaitu fungsi musikal dan fungsi sosial. Fungsi musikal adalah fungsi karawitan yang berhubungan dengan kesenian lain, misalnya tari, pedalangan, atau bentuk seni yang lain. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi karawitan yang berkaitan dengan upacara-upacara tertentu.³⁴ Dengan demikian karawitan di Karaton Surakarta menduduki peran yang sangat vital, hal ini dikarenakan karawitan ia selalu hadir dalam berbagai keperluan baik untuk keperluan musikal maupun sebagai bagian dari upacara tradisi karaton.

Larson menyatakan bahwa penyelenggaraan upacara dan pesta besar-besaran merupakan kegiatan yang paling menonjol pada masa pemerintahan Paku Buwana X³⁵. Hampir semua upacara yang diselenggarakan oleh Paku Buwana X menggunakan jasa karawitan. Pada bagian lain Larson melaporkan bahwa pada masa pemerintahan Paku Buwana X penyelenggaraan upacara dan pesta secara besar-besaran merupakan kegiatan yang paling menonjol di Karaton Surakarta.³⁶ Pernyataan ini jika dihubungkan dengan fungsi karawitan di karaton yang selalu hadir dalam setiap upacara maka dapat dipastikan frekuensi kegiatan karawitan karaton juga mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan hampir dalam setiap upacara dan pesta karawitan merupakan salah satu bagian yang berperan penting. Dapat dibayangkan betapa padatnya aktifitas karawitan karaton hingga kehidupan karawitan pada masa ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Salah satu bukti yang dapat digunakan sebagai petunjuk padatnya aktifitas karawitan adalah Serat Sri Karongron yang ditulis oleh R. Ng. Purbadipura.

Serat Sri Karongron mendeskripsikan setiap upacara serta perangkat gamelan yang digunakan. Upacara-upacara tersebut diantaranya adalah karawitan dalam upacara penghadapan (*pasewakan*), karawitan dalam perayaan *Garebeg Besar*, karawitan dalam perayaan *Garebeg Mulud*, karawitan dalam

peringatan *Tingalan Dalem Pawukon*, karawitan dalam hajat dalem *tetesan*, karawitan klenengan, karawitan dalam acara kunjungan Paku Buwana X ke Kraton Yogyakarta, karawitan dalam upacara perjamuan tamu dari Jerman, karawitan dalam penyambutan Patih Danureja, dan karawitan dalam acara pelepasan dan penyambutan Pangeran Hangabehi.³⁷

Laporan R. Ng. Purbadipura dalam Serat Sri Karongron menyiratkan adanya denyut kehidupan karawitan karaton yang ditunjukkan dengan hadirnya karawitan dalam setiap upacara tradisi karaton, baik upacara kenegaraan maupun upacara keluarga atau kerabat kerajaan. Selain itu R. Ng. Pradjapangrawit juga melaporkan banyaknya gending yang tercipta pada masa pemerintahan Paku Buwana X³⁸, hal ini menunjukkan kreativitas karawitan yang tumbuh subur pada masa itu. Sebuah perjalanan panjang karawitan Karaton Surakarta yang mulai aktif pada masa pemerintahan Paku Buwana II mencapai tataran yang klasik, mentradisi pada masa pemerintahan paku Buwana IV hingga mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Paku Buwana X. Pada masa ini semua unsur beserta faktor pendukung karawitan berkembang dan mencapai tataran puncak.

Karawitan Masa Pemerintahan Paku Buwana XI

Kehidupan karawitan karaton yang mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Paku Buwana X tidak dapat dipertahankan oleh penerusnya Paku Buwana XI. Akhir Nopember 1938 Paku Buwana X sakit parah dan akhirnya mangkat pada tanggal 20 Pebruari 1939³⁹. Sepeninggal Paku Buwana X kehidupan karawitan karaton mengalami kemunduran, salah satu petunjuk kemunduran kehidupan karawitan karaton adalah sedikitnya jumlah gending yang tercipta pada masa itu. Pradjapangrawit hanya mencatat dua gending yaitu Rajamandhala serta Ladrang Rajasuka.⁴⁰

Paku Buwana XI yang naik tahta menggantikan ayahnya tidak dapat meneruskan apa yang telah dicapai oleh Paku Buwana X. Kehidupan karawitan mengalami kemunduran yang ditandai dengan menurunnya aktifitas

karawitan di karaton. Petunjuk lain yang dapat dijadikan sebagai penanda kemunduran kehidupan karawitan adalah menurunnya jumlah *abdi dalem pengrawit*. Pada masa pemerintahan Paku Buwana XI jumlah *abdi dalem pengrawit* mulai berkurang karena banyak yang meninggal dan tidak dilakukan regenerasi yang berarti, upacara-upacara kerajaan berlangsung sederhana bahkan ada yang dihilangkan.⁴¹

KGPH Hangabehi naik tahta menjadi Paku Buwana XI pada tanggal 26 April 1939 setelah sebelumnya bergelar *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegara Sudibya Rajaputra Narendra ing Mataram*. Paku Buwana XI adalah putra sulung Paku Buwana X dari istri selir Raden Ayu Mandayaretna yang dilahirkan pada Senin Kliwon, 1 Pebruari 1886 dengan nama kecil Bandara Raden Mas Hanantasena. Proses pergantian kepemimpinan di karaton pasca mangkatnya Paku Buwana X diwarnai dengan konflik intern keluarga karaton. Hal ini ditandai dengan adanya dua pihak yang memiliki calon raja yang berbeda. Satu pihak menginginkan KGPH Hangabehi yang menggantikan Paku Buwana X dan pihak lain menginginkan KGPH Kusumoyudo naik tahta. Konflik internal ini tidak perlu terjadi seandainya Paku Buwana X menunjuk salah seorang anaknya menjadi putra mahkota.⁴²

Sukses kepemimpinan karaton yang diwarnai dengan konflik internal di kalangan bangsawan karaton sangat menyita perhatian sehingga Paku Buwana XI tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Roda pemerintahan yang tidak berputar dengan normal karena iklim yang tidak kondusif di kalangan bangsawan menyebabkan kehidupan karawitan karaton menurun drastis. Jika Paku Buwana X mampu melindungi bahkan menghidupi karawitan beserta senimannya (dalam hal ini *abdi dalem pengrawit*), oleh penggantinya peran ini tidak dapat diteruskan hingga kehidupan karawitan mengalami kemunduran.

Suatu perubahan besar telah terjadi pada tahun 1939 yaitu awal bertahtanya Paku Buwana XI.⁴³ KGPH Hangabehi yang naik tahta menjadi Paku Buwana XI tidak didukung secara bulat menyebabkan karaton menemui banyak kesulitan yang berdampak pada kehidupan kesenian

termasuk karawitan. Belanda yang memiliki kepentingan politik terhadap karaton juga berperan besar dalam menentukan pengganti Paku Buwana X. Melalui Gubernur Orie Belanda mendukung KGPH Hangabehi menjadi Paku Buwana XI, karena jika KGPH Hangabehi naik tahta Belanda dapat memainkan peran politiknya.⁴⁴

Masuknya Belanda dalam urusan internal karaton merupakan pertanda buruk bagi kehidupan Karaton Surakarta. Larson melukiskan bahwa campur tangan Belanda merupakan sejarah awal keruntuhan karaton.⁴⁵ Selain itu campur tangan Belanda dalam urusan internal karaton termasuk proses pergantian tahta menyebabkan perjuangan karaton dalam mempertahankan otonominya semakin berat. Pada masa pemerintahan Paku Buwana X kehidupan karawitan begitu menggembirakan, karena karaton masih memiliki otonomi.

Zainudin Fananie menjelaskan bahwa otonomi karaton dalam hal ini juga mencakup konsep sosial ekonomi karaton, yang dimaksud konsep sosial ekonomi karaton adalah hubungan dan aktivitas yang dilakukan karaton dengan masyarakat berkaitan dengan strategi pembangunan ekonomi, yang mencakup hubungan perdagangan, pertanian, dan sekaligus hubungan sosial budayanya.⁴⁶ Dengan otonomi yang dimiliki semua kebijakan yang menyangkut hidup dan tata cara kehidupan masyarakat diatur oleh karaton sendiri.

Situasi tersebut setidaknya berlangsung hingga pemerintahan Paku Buwana X. Pada masa-masa ini segala macam bentuk pengeluaran maupun cara mendapatkan pemasukan dalam rangka pembiayaan aktifitas karaton ditentukan sendiri oleh karaton karena otonomi yang dimiliki. Sebagai komunitas (negara) karaton memerlukan biaya untuk menopang kehidupannya yang tidak sedikit jumlahnya. Karena karaton pada saat itu masih memiliki otonomi maka pembiayaan tersebut dapat ditutup karena pada saat itu karaton memiliki sumber penghasilan sendiri dan dikelola sesuai dengan kebutuhan karaton.

Sebenarnya secara ekonomi dan politis kekuasaan karaton telah lama memudar, tepatnya setelah Perjanjian Giyanti (1755) yang berisi pembagian wilayah Mataram menjadi dua bagian

yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Sebagaimana dikatakan Larson bahwa secara *de jure* wilayah kekuasaan karaton atas tanah manca negara dikurangi secara bertahap oleh pemerintah kolonial Belanda sejak Perjanjian Giyanti (1755) hingga masa pemerintahan Paku Buwana X (awal abad XX). Dapat digambarkan, bahwa sepanjang sisa abad XIX Karaton Surakarta hanya diberi sekelumit semi otonomi yang menyedihkan, impoten, dan makin lama makin anakronistis.⁴⁷

Sebuah kenyataan yang menyedihkan ketika sebuah kerajaan besar harus terpecah, bahkan daerah pecahannya dibagi-bagi lagi hingga Karaton Surakarta mengalami penyempitan wilayah yang berarti kekuasaan politik raja juga mengalami penyusutan. Penyempitan wilayah juga diduga menjadi salah satu sebab kemunduran karawitan karaton pada masa pemerintahan Paku Buwana XI. Pada masa pemerintahan Paku Buwana X banyak sekali garap karawitan yang berasal dari daerah bawahan yang distilisasi hingga diakui sebagai produk budaya karaton.

Garap *bonang imbal, kendang ciblon, keplok*, dan *senggakan* merupakan garap karawitan dari luar tembok karaton yang diadopsi dan diolah sedemikian rupa sehingga diakui sebagai produk budaya karaton. Namun setelah daerah manca negara (bawahan) lepas maka karaton tidak memiliki lagi sumber garap karawitan di luar tembok karaton. Darsiti Soeratman mengungkapkan bahwa penyusutan kekuasaan politik raja mempunyai dampak pada bidang kultural di karaton.⁴⁸

Selain berdampak pada bidang kultural, penyempitan wilayah juga berdampak pada bidang ekonomi yang dirasakan sangat memukul denyut kehidupan karaton. Dengan berkurangnya daerah bawahan maka sumber pendapatan karaton secara otomatis juga berkurang yang berarti pula berkurangnya sumber-sumber perekonomian karaton. Jika sebelumnya karaton mendapatkan segala sesuatu untuk keperluan pembiayaan kelangsungan hidup, maka setelah daerah-daerah tersebut lepas, karaton tidak lagi memiliki sumber pendapatan dari daerah-daerah bawahan.

Darsiti Soeratman menyatakan bahwa kemerosotan kekuasaan politik raja membawa pengaruh dalam bidang ekonomi.⁴⁹ Sebelum

daerah-daerah bawahan karaton lepas keperluan karaton yang tidak bisa dipenuhi dari daerah sekitar karaton dipenuhi oleh daerah-daerah bawahan. Dengan demikian semua keperluan dan kebutuhan karaton dapat dicukupi karena sebelum daerah-daerah bawahan lepas karaton memiliki sumber penghasilan sendiri. Sumber-sumber tersebut antara lain daerah tertentu yang menyediakan beras untuk keperluan dapur istana, desa tertentu menyediakan minyak kelapa, serta hutan tertentu untuk persediaan kayu bagi bangunan istana.

Paku Buwana X dapat melindungi serta menghidupi karawitan karaton hingga mencapai masa keemasan karena didukung oleh situasi sosial ekonomi karaton yang memungkinkan. Pada masa pemerintahan Paku Buwana XI situasi perekonomian karaton berada pada posisi yang menyulitkan untuk berkembang, karena untuk menghidupi karawitan karaton diperlukan biaya yang tidak sedikit mengingat jumlah *abdi dalem pengrawit* pada saat itu berjumlah 200-an. Aktifitas karawitan berkurang serta banyaknya upacara tradisi yang tidak berlangsung merupakan petunjuk bahwa kondisi perekonomian karaton mengalami kesulitan yang berdampak pada kemunduran karawitan karaton. Hal ini dikarenakan perkembangan kesenian antara lain bergantung pada keadaan sosial ekonomi dan sikap masyarakat terhadap seni.⁵⁰

Kondisi perekonomian karaton yang memburuk juga diakibatkan karena adanya kontrak politik baru sebelum Paku Buwana XI naik tahta, kontrak politik tersebut berisi antara lain mengurangi secara drastis kekuasaan Susuhunan⁵¹ yang baru, dan mengadakan pengurangan secara mendadak dan secara besar-besaran dalam anggaran belanja karaton. Pemotongan anggaran karaton sampai separuh dari anggaran sebelumnya mengakibatkan 3000-4000 orang kehilangan pekerjaan.⁵²

Di antara pegawai karaton yang kehilangan pekerjaan adalah *abdi dalem* pengrawit yang menjadi penyangga utama kehidupan karawitan karaton, bahkan *abdi dalem* pengrawit mengalami dampak terburuk karena dikurangi secara besar-besaran. Pada masa pemerintahan Paku Buwana X *abdi dalem pengrawit* memiliki semangat yang luar biasa dalam mengembangkan kehidupan karawitan hingga pada masa ini *abdi*

dalem pengrawit dapat dikatakan sebagai *saka guru* yang dimaknai sebagai penyangga utama kehidupan karawitan yang memelihara kualitas, mengembangkan garap, menularkan kemampuan kepada generasi penerus, serta melahirkan ciptaan-ciptaan gending baru atas pesanan raja maupun ekspresi musikal yang muncul dari para pengrawit itu sendiri.⁵³

Ketika *abdi dalem pengrawit* sebagai penyangga utama kehidupan karawitan banyak yang dikeluarkan karena adanya pengurangan anggaran belanja karaton, dapat dipastikan kehidupan karawitan karaton mengalami kemunduran. Jika pada masa pemerintahan Paku Buwana X *abdi dalem pengrawit* mencapai 200-an yang terbagi dalam tujuh golongan, pada masa pemerintahan Paku Buwana XI hanya tinggal tiga golongan.

Tujuh golongan *abdi dalem pengrawit* yang menjadi penyangga utama kehidupan karawitan pada masa pemerintahan Paku Buwana X terdiri atas empat kelompok empat kelompok *abdi dalem niyaga kasepuhan*, dua kelompok *abdi dalem niyaga kadipaten*, dan satu kelompok *abdi dalem niyaga panakawan*. Ketujuh golongan tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda, *abdi dalem niyaga kasepuhan* bertugas menyajikan gending-gending bedhaya-srimpi, gending-gending pakurmatan, serta gending wayangan. *Abdi dalem kadipaten* bertugas melayani kepentingan putra mahkota dan kepatihan, sedang *abdi dalem panakawan* berkewajiban mengisi kekosongan jika ada *abdi dalem* dari golongan lain yang berhalangan hadir.⁵⁴

Penyusutan jumlah *pengrawit* dari tujuh golongan menjadi tiga golongan jelas mempengaruhi aktifitas karawitan karaton, meskipun pada masa pemerintahan Paku Buwana XI intensitas kegiatan upacara tradisi karaton jauh menurun akan tetapi karena tugas dan kewajiban yang berbeda dari masing-masing golongan menyebabkan para *pengrawit* harus menyesuaikan dengan tugas dan kewajiban yang baru. Dapat dipastikan tugas *pengrawit* pada masa pemerintahan Paku Buwana XI menjadi lebih berat ditambah dengan banyaknya beberapa pilar utama karawitan karaton satu persatu keluar karena alasan ekonomi.

Masa pemerintahan Paku Buwana XI adalah masa-masa sulit bagi Karaton Surakarta.

Paparan di atas telah menyebutkan bahwa karaton mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi serta krisis politik internal karena adanya perbedaan pendapat tentang siapa pengganti Paku Buwana X karena Sunan tidak mengangkat putra mahkota secara resmi. Kesulitan di bidang ekonomi serta krisis politik internal yang berdampak pada kehidupan budaya karaton diperburuk dengan kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada awalnya kedatangan Jepang memberikan harapan baru bagi Indonesia karena dapat melepaskan diri dari cengkeraman Belanda. Akan tetapi harapan itu ternyata hanya mimpi di siang bolong karena kedatangan Jepang semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi Indonesia.

Harapan Bangsa Indonesia kepada Jepang akhirnya tinggal harapan kosong, pada akhirnya Jepang ingin menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan upaya Jepang menyusun dan mengarahkan perekonomian Indonesia yang dijabarkan dalam dua kebijakam politik yaitu menghapuskan pengaruh pengaruh kolonial Belanda dan memobilisasi rakyat Indonesia untuk kepentingan kemenangan Jepang dalam perang melawan bangsa Eropa⁵⁵ Di Surakarta kedatangan Jepang selain berdampak pada bidang sosial ekonomi juga berdampak pada bidang kesenian, termasuk karawitan. Kehidupan karawitan karaton yang memudar pasca mangkatnya Paku Buwana X akhirnya semakin tenggelam ketika Jepang menginjakkan kaki di Indonesia. Hampir semua aktifitas kesenian dihentikan, termasuk aktifitas karawitan karaton. Bahkan perayaan Sekaten pada tahun 1944 dilarang diselenggarakan di kompleks Masjid Agung serta gamelan Sekaten hanya diizinkan berbunyi pada siang hari.⁵⁶

Larangan menyelenggarakan perayaan Sekaten di kompleks Masjid Agung merupakan tindakan yang tidak kooperatif dari pemerintah Jepang, jika pemerintah kolonial Belanda masih mengizinkan semua upacara tradisi karaton berlangsung sebagaimana mestinya, pemerintah Jepang melakukan tindakan yang sangat berlawanan dengan kebijakan pemerintah Belanda. Di mata rakyat Surakarta pemerintah Jepang dinilai tidak memahami makna simbolik Sekaten dan eksistensi karaton yang berarti

mengurangi kewibawaan raja di mata rakyat Surakarta hingga menimbulkan kebencian kepada Jepang yang akhirnya berujung pada perlawanan secara fisik terhadap pemerintah Jepang.

Situasi politik yang tidak kondusif karena adanya perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Surakarta menyebabkan situasi perekonomian karaton semakin memburuk yang berdampak pada penurunan aktifitas kesenian (karawitan) di karaton. Semakin banyak *abdi dalem pengrawit* yang meninggalkan karaton karena himpitan ekonomi yang disebabkan ketidakmampuan karaton memberikan jaminan kesejahteraan bagi *abdi dalem* pengrawit seperti pada masa pemerintahan Paku Buwana X, akhirnya menyebabkan kehidupan karawitan istana (karaton) pada masa pendudukan Jepang semakin terpuruk yang berakibat pula pada kemunduran baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pemerintah Jepang tidak memahami bahwa Surakarta adalah kota budaya di mana terdapat Karaton Surakarta yang masih diakui kewibawaannya oleh masyarakat Surakarta. Pelarangan terhadap aktifitas dan tradisi karaton akhirnya berdampak pada kemunduran situasi politik di Surakarta selain kemunduran situasi sosial ekonomi. Perayaan Sekaten yang memiliki nilai-nilai kultural, keagamaan, kewibawaan, magis dan kebersamaan raja dan rakyatnya dilarang diselenggarakan di Masjid Agung merupakan bentuk kecurigaan pemerintah Jepang yang berlebihan terhadap aktifitas orang pribumi.

Sikap yang sama sekali tidak kooperatif terhadap bidang-bidang yang sensitive bagi masyarakat pemilikinya seperti upacara ritual dan kegiatan kesenian menimbulkan sikap kebencian kolektif masyarakat Jawa terhadap pendudukan Jepang dan secara terus menerus menjadi semakin membara.⁵⁷ Kebencian masyarakat Surakarta terhadap pemerintah Jepang yang akhirnya berujung pada perlawanan fisik merupakan salah satu bentuk kemunduran politik. Situasi sosial politik yang tidak menentu menyebabkan kehidupan budaya mengalami kemerosotan yang signifikan, sehingga pada masa kemunduran politik sangat tidak memungkinkan berpikir tentang kemajuan kesenian karena situasi dan kondisi yang tidak

memungkinkan. Dalam hal ini Soemarsaid Moertono menyatakan bahwa janggal sekali pada masa kemunduran politik justru mengalami kehidupan budaya yang begitu subur dan penghalusan serta pelanggaran tata krama dan kesenian begitu berlebih-lebihan.⁵⁸

Kedatangan Jepang yang semula menawarkan janji-janji, menganggap Indonesia sebagai saudara pada akhirnya hanyalah isapan jempol belaka. Pada masa ini semua aktivitas kehidupan masyarakat dibatasi ruang lingkungannya. Pengerahan tenaga kerja yang berlebihan yang berdampak munculnya kekacauan, kelaparan di mana-mana, termasuk kekacauan sektor ekonomi, teror polisi militer (*kempetai*), kesombongan dan kekejaman, pemukulan dan pemerkosaan merajalela sampai di desa-desa. Semua tindakan Jepang sebenarnya telah dirancang untuk keuntungan politik dan ekonomi pihak Jepang.⁵⁹

Semua tindakan Jepang seperti tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat Surakarta. Selain semua tindakan di atas, pada masa pendudukan Jepang hampir semua kegiatan orang-orang pribumi dihentikan dengan alasan keamanan. Tidak terkecuali kegiatan kesenian termasuk karawitan juga dilarang oleh pemerintah Jepang. Di lingkungan karaton *abdi dalem* pengrawit dilarang memakai keris jika melaksanakan kewajiban, bahkan perayaan Sekaten juga dibatasi yang akhirnya hanya dilaksanakan di Sitinggil. Di luar tembok karaton kegiatan karawitan bahkan dilarang sama sekali yang ditandai dengan dikumpulkannya semua perangkat gamelan tidak boleh ditabuh yang menyebabkan kegiatan karawitan di luar karaton berhenti total.⁶⁰

Tindakan-tindakan pemerintah Jepang seperti tersebut di atas akhirnya merubah pola sosial budaya masyarakat Surakarta. Perubahan pola sosial budaya yang nampak adalah denyut nadi kehidupan kota Surakarta yang biasanya ramai karena banyaknya kegiatan sosial budaya termasuk karawitan menjadi sepi karena adanya pembatasan aktifitas warga kota di malam hari. Sebuah gejala pasang surut kebudayaan (kesenian) tidak akan lepas dari interaksi pengaruh perubahan pola sosial budaya masyarakatnya.⁶¹ Hal inilah yang diduga menjadi

salah satu penyebab kemunduran kehidupan karawitan karaton pada masa pemerintahan Paku Buwana XI.

Kesimpulan

Suatu keadaan yang sangat bertolak belakang ketika membandingkan kegigihan Paku Buwana X dengan Paku Buwana XI dalam melawan kaum penjajah. Jika Paku Buwana X mampu memainkan simbol-simbol budaya sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, maka Paku Buwana XI tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan pemerintah Jepang. Pengurangan sebesar 50% dari dana yang dijatuhkan pemerintah kolonial Belanda kepada karaton merupakan awal kemunduran kehidupan tradisi karaton.

Perubahan di bidang karawitan yang terjadi pada masa pemerintahan Paku Buwana XI sebenarnya bukan perubahan yang diharapkan karena kehidupan karawitan justru mengalami kemunduran. Rentang waktu pemerintahan Paku Buwana XI yang relatif singkat ternyata tidak dapat mempertahankan apa yang telah dicapai oleh ayahnya yang telah membawa kehidupan karawitan karaton ke puncak kejayaan dan keemasan. Kemunduran kehidupan karawitan karaton bersamaan dengan merosotnya tradisi karaton. Koentjaraningrat menyatakan bahwa pada masa-masa tersebut karaton sebagai pusat kebudayaan mulai memudar, karaton mulai kehilangan kedudukan sebagai pusat orientasi nilai-nilai budaya Jawa, pusat adat-istiadat, dan pusat kesenian Jawa.⁶²

Sepeninggal Paku Buwana X, penggantinya yaitu Paku Buwana XI tidak dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai oleh pendahulunya. Pada masa ini kehidupan karawitan karaton mengalami kemunduran. Salah satu penyebab mundurnya kehidupan karawitan karaton pada masa pemerintahan Paku Buwana XI adalah suksesi yang memicu konflik internal bangsawan karaton karena masing-masing pihak menginginkan kandidatnya menjadi raja merupakan penyebab dari lingkungan karaton sendiri. Di satu pihak menginginkan KGPH Hangabehi menjadi raja sedang di pihak lain menginginkan KGPH

Kusumayuda naik tahta. Dalam situasi konflik internal tersebut siapapun yang terpilih pasti akan berada pada posisi yang sulit karena tidak didukung secara bulat.

Faktor internal lain yang menjadi penyebab kemunduran kehidupan karawitan adalah hilangnya penyangga utama kehidupan karawitan karaton, dalam hal ini adalah *abdi dalem pengrawit*. Selain karena faktor usia beberapa *pengrawit* dikeluarkan karena adanya pengurangan anggaran belanja karaton sehingga karaton tidak mampu memberi gaji pegawai kerajaan yang berjumlah besar. Ironisnya yang paling merasakan dampak buruk akibat pengurangan anggaran belanja karaton yang mencapai 50% adalah *abdi dalem pengrawit*. Banyak *abdi dalem pengrawit* dikeluarkan bahkan ada yang keluar atas inisiatif sendiri, ketika karawitan karaton mulai ditinggal *abdi dalem pengrawit* sebagai penyangga utama karawitan karaton kemerosotan kualitas maupun kuantitas tidak dapat dihindari.

Kemunduran karawitan karaton juga disebabkan oleh faktor-faktor dari luar karaton. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mengurangi daerah bawahan (manca negara), pengurangan otonomi, pembatasan ruang gerak raja, serta adanya kontrak politik yang baru sebelum Paku Buwana XI naik tahta diduga merupakan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kehidupan karawitan karaton mengalami kemerosotan. Masuknya Jepang ke wilayah Surakarta semakin memperburuk situasi sosial, politik, dan ekonomi yang akhirnya berdampak pada kemunduran karawitan karaton. Jepang yang tidak memahami simbol-simbol budaya karaton dan kesenian pada umumnya menyebabkan kebencian kepada Jepang. Kecurigaan yang berlebihan terhadap kegiatan orang-orang pribumi menyebabkan Jepang mengeluarkan peraturan yang membatasi kegiatan pribumi pada malam hari karena alasan keamanan. Larangan memakai keris saat *abdi dalem* menjalankan tugas dan larangan merayakan Sekaten di kompleks Masjid Agung semakin memicu kebencian terhadap pemerintah Jepang yang akhirnya berujung pada perlawanan secara fisik terhadap pemerintah Jepang. Situasi politik yang semakin tidak menentu karena adanya

perlawanan fisik merupakan salah satu penyebab kemunduran karawitan karaton dari luar lingkungan karaton.

(Endnotes)

¹ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 1995. hal. 149.

² Istilah lain untuk menyebut pecahnya Mataram menjadi dua yaitu Surakarta dan Yogyakarta.

³ Zainudin Fananie, *Pandangan Dunia KGPA Hamangkunagoro I Dalam Babad Tutur: Sebuah Restrukturasi Budaya*. Surakarta. Muhammadiyah University Press. 1994. hal. 220.

⁴ Pradjapangrawit, *Wedhapradangga: Serat Sujarah utawi Riwayating Gamelan*. Surakarta. STSI Press 1990. hal. 85-86.

⁵ Klenengan adalah penyajian karawitan mandiri yang tidak terkait dengan bentuk kesenian lain.

⁶ Karawitan tari merupakan penyajian karawitan untuk keperluan musik tari

⁷ Rustopo, 1995. hal. 3.

⁸ Perangkat gamelan lengkap.

⁹ Perangkat gamelan khusus untuk menghormati seseorang atau peristiwa tertentu, ada empat jenis yaitu gamelan carabalen, kodhok ngorek, monggang dan sekaten.

¹⁰ Srimpen adalah komposisi karawitan (gending) yang disajikan untuk keperluan tari srimpi.

¹¹ Aturan-aturan, biasanya berupa konvensi yang disepakati bersama.

¹² Darsono, 1999. hal. 1.

¹³ Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan Kawula*. Yogyakarta. Ombak. 2004. hal. 22.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, Dan Kawula: Surakarta 1900-1915*. Yogyakarta. Ombak. 2004. hal. 3.

¹⁵ Tempat peristirahatan, biasanya berupa bangunan atau istana kecil yang terletak di pinggiran kota.

¹⁶ Simbol (logo) Karaton Surakarta.

¹⁷ Kuntowijoyo, 2004 hal. 20.

¹⁸ Kuntowijoyo, 2004 hal. 44.

¹⁹ Daniel Goleman dalam Kuntowijoyo, 2004. hal. 8.

²⁰ Pradjapangrawit, 1990. hal. 149.

²¹ Waridi, 2006. hal. 124.

²² Waridi, *Karawitan Jawa Masa Pemerintahan PB X: Perspektif Historis dan Teoritis*. Surakarta. ISI Press. 2006. hal. 12.

²³ Pradjapangrawit, 1990. hal. 149.

Kepustakaan

Darsono. 1999. "Cokrodiharo dan Sunarto Cipto Suwarso: Pengrawit Unggulan Luar Tembok Karaton," Tesis. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

Fananie, Zainudin. 1994. *Pandangan Dunia KGPA Hamangkoenagoro I dalam Babad Tutur: Sebuah Restrukturasi Budaya*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

George. D., Larson. 1990. *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*. Terj. AB Lopian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kuntowijoyo. 2004. *Raja, Priyayi, Dan Kawula*. Yogyakarta: Ombak.

Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Pemberton, John. 2003. *Jawa: On the Subject of Java*. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Pradjapangrawit. 1990. *Serat Sujarah Utawi Riwayating Gamelan: Wedhapradangga (Serat Saking Gotek)*. Surakarta: STSI Press.

Ricklefs, M.C. 1995. *Sejarah Indonesia Modern*. Terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rustopo. 1994. "Keberadaan Karawitan di Karaton Kasunanan Surakarta Pada Masa Pemerintahan Paku Buwana X Menurut Serat Sri Karongron. Laporan Penelitian Surakarta: Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.

- Soeratman, Darsiti. 1989. *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Taman Siswa.
- Supanggih, Rahayu. 1984. "Pengetahuan Karawitan", Makalah Seminar Mahasiswa. Surakarta: Akademi Seni Karawitan Indonesia.
- _____. 2002. *Bothekan Karawitan I*. Jakarta: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Susila, Hardja. 1994. "Kesesinambungan dan Perubahan Dalam Seni Karawitan Jawa Tengah" dalam *Seni: Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Seni*. 02/IV, April.
- Tim Redaksi Solopos. 2005 *Di Balik Suksesi Keraton Surakarta Hadiningrat*. Surakarta: Aksara Solo Pos.
- Waridi. 2001. *Martopangrawit: Empu Karawitan Gaya Surakarta*. Yogyakarta: Mahavhira.
- _____. 2006. *Karawitan Jawa Masa Pemerintahan PB X: Perspektif Historis dan Teoritis*. Surakarta: ISI Press.